

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah untuk aspek finansial adalah dana perimbangan yang mencerminkan kemandirian daerah dan belanja modal yang mencerminkan pengelolaan aset daerah, kemudian untuk kinerja non finansial yakni keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi dan praktik politik dinasti serta opini audit. Dalam objek penelitian tersebut yang menjadi variabel independennya adalah dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi dan praktik politik dinasti yang dilakukan kepala pemerintahan daerah sedangkan variabel dependennya yakni opini audit. Objek yang akan diteliti adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan kerangka pikir serta hipotesis. Maka jenis metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Penelitian kuantitatif ini dipilih karena menggunakan statistik dalam menganalisis data penelitian serta menggunakan pengukuran variabel dengan angka dalam pengujian yang dilakukan. Selain itu penelitian kuantitatif dianggap lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada pada lapangan (Ahyar et al., 2020).

Desain penelitian analisis regresi logistik adalah penelitian digunakan untuk menguji tingkat probabilitas terjadinya variabel dependen yang dapat diprediksi dengan variabel independen. Regresi logistik yang digunakan adalah *binary logistic regression* karena variabel terikatnya merupakan variable *dummy*. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara aspek finansial yang terdiri dari dana perimbangan dan belanja modal, kemudian kinerja non finansial yang terdiri dari keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi serta praktik politik dinasti, terhadap opini audit pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia.

### 3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Menurut (Sinambela Lijan Poltak & Sarton Sinambela, 2021), variabel dalam penelitian adalah atribut, nilai/sifat suatu objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu antara satu dengan yang lain dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti serta disajikan informasi terkaitnya, disertai hasil penelitiannya. Sebaliknya, menurut (Silaen, 2018), variabel adalah konsep yang mempunyai sejumlah nilai, seperti sifat, karakteristik, atau fenomena yang menunjukkan sesuatu yang dapat ditentukan berdasarkan nilainya. Salah satu contoh penjabaran mengenai variabel dalam penelitian ini adalah:

#### 3.3.1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai stimulus, prediktor, atau anteseden. Dalam bahasa Indonesia, variabel ini sering disebut sebagai "bebas", yang berarti merupakan penyebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen atau terikat (Sinambela Lijan Poltak & Sarton Sinambela, 2021). Variabel ini dilambangkan sebagai Variabel X. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk aspek finansial, seperti dana perimbangan dan belanja modal, dan untuk aspek non-keuangan, seperti keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi dan praktik politik dinasti.

#### 3.3.2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat, yang juga dikenal sebagai variabel output atau kriteria, adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel bebas dalam suatu penelitian (Sekaran, 2016) Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah opini audit, yang dilambangkan sebagai variabel Y.

#### 3.3.3. Operasional Variabel

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
Dana Perimbangan (X1)	Menurut (Mahmudi, 2020) Dana Perimbangan adalah bagian dari kebijakan fiskal	Jumlah nominal dana perimbangan	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
	desentralisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, memastikan penyediaan layanan publik yang merata, dan mengurangi ketimpangan antar daerah melalui mekanisme distribusi yang adil berdasarkan formula tertentu.		
Belanja Modal (X2)	Menurut (Mardiasmo, 2021), belanja modal adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi dalam aset tetap yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Belanja modal memiliki karakteristik menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang serta mendukung peningkatan produktivitas wilayah.	Jumlah nominal belanja modal (Imawan & Wahyudin, 2014)	Rasio
Keterbukaan Sistem Informasi Publik (X3)	Menurut (Efraim Turban et al., 2021) Sistem Informasi Publik adalah sistem berbasis teknologi	Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy dengan kategori:	Nominal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
	<p>informasi yang dirancang untuk memproses dan mendistribusikan informasi mengenai layanan publik kepada masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi, mempercepat pelayanan, dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi publik.</p>	<p>Kategori (0): Diberikan untuk pemerintah daerah yang menyediakan informasi yang tidak lengkap seperti laporan keuangan dan anggaran.</p> <p>Kategori (1): Diberikan untuk pemerintah daerah yang menyediakan informasi yang lengkap seperti laporan keuangan dan anggaran</p>	
<p>Tingkat Korupsi (X4)</p>	<p>Menurut (Transparency International, 2022), tingkat korupsi adalah ukuran seberapa besar korupsi terjadi dalam sebuah negara atau organisasi, yang ditentukan melalui indeks persepsi korupsi. Tingkat korupsi yang tinggi menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan serta terbatasnya transparansi dalam administrasi publik.</p>	<p>Tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dibagi dengan 10.000 penduduk</p>	<p>Rasio</p>

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
Praktik Politik Dinasti (X5)	(Aspinall & Berenschot, 2019) mendefinisikan Politik dinasti sebagai keberlanjutan kekuasaan politik di tangan satu keluarga melalui mekanisme demokrasi formal tetapi didukung oleh praktik-praktik informal, seperti mobilisasi sumber daya dan pengaruh sosial.	<p>Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy dengan kategori:</p> <p>Kategori (0): Diberikan untuk kepala pemerintah daerah yang terindikasi melakukan praktik politik dinasti. Kategori (0) diberikan kepada kepala daerah dengan jumlah hubungan kekerabatan <math>\geq 2</math> dengan pejabat legislative serta eksekutif lainnya.</p> <p>Kategori (1): Diberikan untuk kepala pemerintah daerah yang terindikasi tidak melakukan praktik politik dinasti. Kategori (1) diberikan pada kepala daerah dengan jumlah hubungan kekerabatannya <math>&lt; 2</math> dengan pejabat</p>	Nominal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Data
		legislatif serta eksekutif lainnya	
Opini Audit (Y)	Menurut (Arens et al., 2019) Opini audit adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh auditor independen sebagai hasil dari pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) atau standar akuntansi lainnya. Opini ini memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan mengenai kewajaran informasi yang disajikan.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Priyatna & Pramono, 2015) opini audit diukur dengan variabel dummy dengan kategori:  Kategori(0) Diberikan untuk pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang memperoleh opini selain dari opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2023.  Kategori(1) Diberikan untuk pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2023.	Nominal

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nantinya hasil penelitian diberlakukan. Populasi bisa terdiri dari orang, badan, lembaga, institusi, wilayah, kelompok dan sebagainya yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian yang dilakukan (Abdullah, 2015).

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia dengan jumlah 514 pemerintahan daerah kabupaten dan kota, adapun uraiannya sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Daftar Populasi Penelitian**

No.	Nama Provinsi	Jumlah Pemerintahan Kab/Kota
1.	Provinsi Naggroe Aceh Darussalam	23
2.	Provinsi Sumatera Utara	33
3.	Provinsi Sumatera Barat	19
4.	Provinsi Riau	12
5.	Provinsi Kepulauan Riau	7
6.	Provinsi Jambi	11
7.	Provinsi Bengkulu	10
8.	Provinsi Sumatera Selatan	17
9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
10.	Provinsi Lampung	15
11.	Provinsi Banten	8
12.	Provinsi Jawa Barat	27
13.	Provinsi Jawa Tengah	35
14.	Provinsi Jawa Timur	38
15.	Provinsi DI Yogyakarta	5
16.	Provinsi Bali	9
17.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10
18.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	22
19.	Provinsi Kalimantan Barat	14
20.	Provinsi Kalimanta Tengah	14
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	13
22.	Provinsi Kalimantan Timur	10
23.	Provinsi Kalimantan Utara	5
24.	Provinsi Sulawesi Utara	15

No.	Nama Provinsi	Jumlah Pemerintahan Kab/Kota
25.	Provinsi Sulawesi Tengah	13
26.	Provinsi Sulawesi Selatan	24
27.	Provinsi Sulawesi Barat	7
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	17
29.	Provinsi Gorontalo	6
30.	Provinsi Maluku	11
31.	Provinsi Maluku Utara	10
32.	Provinsi Papua	29
33.	Provinsi Papua Barat	12
<b>TOTAL</b>		<b>508</b>

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2019b). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Adapun untuk Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2019b):

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi jumlah pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2023

e = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel, Penelitian ini menggunakan persentase kelonggaran 10%

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapatkan perhitungan:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

$$n = \frac{508}{508(0,10)^2 + 1}$$

$$n = \frac{508}{6,08}$$

$$n = 83.552 \approx 84$$

Menurut (Sugiyono, 2019a), teknik sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, dan terdapat berbagai macam teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* dengan data dari pemerintah daerah di daerah tersebut menggunakan Microsoft Excel. Menurut (Sugiyono, 2019a), teknik *simple random sampling* atau yang dikenal juga dengan acak sederhana sampling merupakan proses pemilihan partisipan dari suatu populasi secara acak tanpa memperhitungkan strata yang ada dalam populasi tersebut. Selanjutnya dalam menentukan jumlah sampel pemerintah daerah dan provinsi di setiap provinsi, peneliti menggunakan proporsi perhitungan sebagai berikut:

Menghitung presentase proporsi:

$$\text{Presentase Proporsi} = \frac{\text{Jumlah Pemda di Provinsi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100\%$$

Menghitung jumlah sampel pemerintah daerah untuk tiap provinsi:

$$\text{Jumlah Sampel untuk tiap Provinsi} = \text{Presentase Proporsi} \times \text{Jumlah Sampel}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka di dapatlah uraian sampel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Daftar Sampel Penelitian**

No.	Nama Provinsi	Jumlah Pemda	Presentase Provinsi	Jumlah Sampel Pemda tiap Provinsi
1.	Provinsi Aceh	23	5%	4
2.	Provinsi Sumatera Utara	33	6%	5
3.	Provinsi Sumatera Barat	19	4%	3
4.	Provinsi Riau	12	2%	2
5.	Provinsi Kepulauan Riau	7	1%	1
6.	Provinsi Jambi	11	2%	2
7.	Provinsi Bengkulu	10	2%	2
8.	Provinsi Sumatera Selatan	17	3%	3
9.	Provinsi Bangka Belitung	7	1%	1
10.	Provinsi Lampung	15	3%	2
11.	Provinsi Banten	8	2%	1
12.	Provinsi Jawa Barat	27	5%	4
13.	Provinsi Jawa Tengah	35	7%	6
14.	Provinsi Jawa Timur	38	7%	6
15.	Provinsi DI Yogyakarta	5	1%	1
16.	Provinsi Bali	9	2%	1
17.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	2%	2
18.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	22	4%	4
19.	Provinsi Kalimantan Barat	14	3%	2
20.	Provinsi Kalimantan Tengah	14	3%	2
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	13	3%	2
22.	Provinsi Kalimantan Timur	10	2%	2
23.	Provinsi Kalimantan Utara	5	1%	1
24.	Provinsi Sulawesi Utara	15	3%	2
25.	Provinsi Sulawesi Tengah	13	3%	2
26.	Provinsi Sulawesi Selatan	24	5%	4

No.	Nama Provinsi	Jumlah Pemda	Presentase Provinsi	Jumlah Sampel Pemda tiap Provinsi
27.	Provinsi Sulawesi Barat	7	1%	1
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	17	3%	3
29.	Provinsi Gorontalo	6	1%	1
30.	Provinsi Maluku	11	2%	2
31.	Provinsi Maluku Utara	10	2%	2
32.	Provinsi Papua	29	6%	6
33.	Provinsi Papua Barat	12	3%	2
<b>TOTAL</b>		<b>508</b>	<b>100%</b>	<b>84</b>

Ket: Hasil pemilihan sampel dengan teknik *random sampling*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil berbasis pada data *cross-sectional* berdasar dengan data yang terdiri lebih dari satu entitas (individu). Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah dikembangkan lebih lanjut dan disebarakan oleh pihak lain, yang ditampilkan antara lain dalam bentuk tabel atau diagram (Abdullah, 2015)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa referensi utama yang relevan dengan topik yang diteliti. Laporan keuangan tahun 2022 diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang dapat diakses melalui laman <https://www.bpk.go.id/>. Data ini digunakan untuk menganalisis opini audit yang diterbitkan oleh BPK terhadap pemerintah daerah. Selain itu, informasi mengenai sistem informasi diperoleh dari masing-masing situs web Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten, yang mencakup pengelolaan dan transparansi anggaran daerah yang penting untuk analisis keterbukaan informasi publik. Data terkait tingkat korupsi di setiap daerah dikumpulkan melalui situs resmi kejaksaan. Selain itu, informasi mengenai praktik politik dinasti diambil dari riset yang dilakukan oleh Negara Institute, yang juga divalidasi dengan berita, artikel, serta sumber literatur lainnya. Untuk melengkapi data, penelitian ini juga mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, berita, riset, dan studi literatur lain

yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Gabungan dari berbagai sumber data ini memberikan perspektif yang komprehensif untuk menganalisis hubungan antara variabel yang diteliti, termasuk opini audit, dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data, melibatkan berbagai indikator seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, jumlah (*sum*), rentang (*range*), serta distribusi data seperti kemencengan (*skewness*) dan kurtosis. Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk menyajikan karakteristik dasar dari variabel-variabel yang diteliti, memberikan pemahaman awal mengenai data sebelum dilakukan analisis lanjutan (Imam Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan memberikan gambaran mendalam terkait variabel penelitian, yaitu dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan informasi publik, tingkat korupsi, praktik politik dinasti, dan opini audit. Melalui analisis deskriptif ini, dapat diketahui pola distribusi data, tingkat variasi, serta kecenderungan dari masing-masing variabel. Pemahaman ini penting sebagai langkah awal untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang diukur dalam penelitian, sebelum melanjutkan ke analisis inferensial untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Statistik deskriptif juga membantu memvalidasi kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut dengan memastikan data tidak memiliki kesalahan distribusi yang signifikan (Sugiyono, 2023)

#### **3.6.2 Analisis Regresi Logistik**

Menurut (Sekaran, 2016) regresi logistik digunakan jika variabel dependen hanya memiliki dua kemungkinan, atau biasa disebut sebagai variabel dummy. Begitu pun pada penelitian ini, variabel dependen, yakni opini audit, diukur dengan nilai 1 jika pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan nilai 0 jika pemerintah daerah mendapatkan opini selain dari opini wajar tanpa pengecualian (WDP, TW, TMP). Analisis ini digunakan untuk menguji apakah opini audit dapat diprediksi oleh variabel independennya (dana perimbangan, belanja

modal, keterbukaan informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti). Model persamaan regresi logistik pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{logit}(P) = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Di mana:

- P adalah probabilitas pemerintah daerah memperoleh opini WTP (opini positif).
- $X_1$  adalah variabel dana perimbangan.
- $X_2$  adalah variabel belanja modal.
- $X_3$  adalah variabel keterbukaan informasi publik.
- $X_4$  adalah variabel tingkat korupsi.
- $X_5$  adalah variabel praktik politik dinasti.
- $\beta_0$  adalah konstanta (intercept) model.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  adalah koefisien regresi yang mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemungkinan memperoleh opini WTP.

Model ini akan menguji hubungan antara faktor-faktor yang disebutkan di atas dengan hasil opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah, dan untuk memprediksi apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tercermin pada opini audit yang diterima.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen, yakni dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti, terhadap opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena variabel dependen dalam penelitian ini bersifat biner (WTP dan selain WTP), regresi logistik digunakan sebagai metode analisis yang sesuai. Regresi logistik memungkinkan peneliti untuk memodelkan probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan variabel-variabel prediktor yang ada (Field, 2024). Dalam uji hipotesis ini, hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap opini audit, akan dibandingkan dengan hipotesis dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap opini audit. Regresi logistik alternatif ( $H_1$ ) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan. Uji dilakukan dengan mengamati p-value untuk masing-masing variabel independen. Jika p-value kurang dari 0,1, maka hipotesis nol ditolak digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan sifat variabel dependen yang biner dan memungkinkan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap peluang terjadinya hasil tertentu pada variabel dependen tersebut (Field, 2013).

Berikut adalah rancangan hipotesis pada penelitian ini:

### **Hipotesis 1**

$H_0: \beta = 0$ , Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

$H_a: \beta \geq 0$ , Dana perimbangan berpengaruh terhadap opini audit.

### **Hipotesis 2**

$H_0: \beta = 0$ , Belanja modal tidak berpengaruh terhadap opini audit.

$H_a: \beta \geq 0$ , Belanja modal berpengaruh terhadap opini audit.

### **Hipotesis 3**

$H_0: \beta = 0$ , Keterbukaan sistem informasi publik tidak berpengaruh terhadap opini audit.

$H_a: \beta \geq 0$ , Keterbukaan sistem informasi publik berpengaruh terhadap opini audit

### **Hipotesis 4**

$H_0: \beta = 0$ , Tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap opini audit.

$H_a: \beta \geq 0$ , Tingkat korupsi berpengaruh terhadap opini audit.

### **Hipotesis 5**

$H_0: \beta = 0$ , Praktik politik dinasti kepala daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit.

$H_a: \beta \leq 0$ , Praktik politik dinasti kepala daerah berpengaruh terhadap opini audit.

### 3.6.4 Uji Wald

Uji Wald digunakan dalam regresi logistik untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi individu, yaitu untuk mengetahui apakah setiap variabel independen berkontribusi secara signifikan terhadap model regresi logistik. Dalam uji Wald, setiap variabel independen akan diuji dengan hipotesis nol bahwa koefisien regresi untuk variabel tersebut sama dengan nol (tidak berpengaruh) terhadap variabel dependen. Jika nilai  $p$  yang dihasilkan lebih kecil dari 0,1, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Field, 2013). Uji Wald menghitung statistik uji berdasarkan rasio antara estimasi koefisien dan standar error dari koefisien tersebut. Semakin besar rasio ini, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap probabilitas terjadinya peristiwa yang diamati dalam variabel dependen. Hasil uji ini memungkinkan peneliti untuk menentukan variabel mana yang memberikan kontribusi paling signifikan dalam memprediksi variabel dependen. Secara keseluruhan, Uji Wald adalah alat yang penting dalam analisis regresi logistik karena dapat membantu memvalidasi apakah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model benar-benar memiliki pengaruh yang dapat diandalkan terhadap outcome yang diukur.